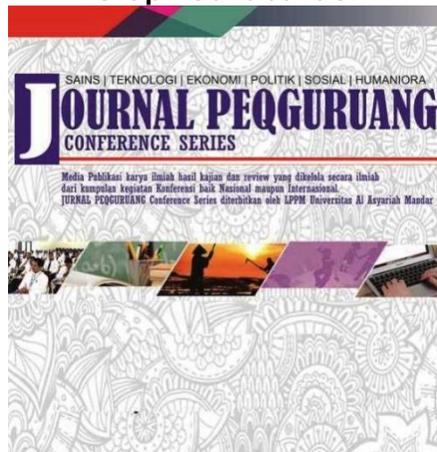


Graphical abstract



EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ULUMAMBI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA DI ERA OTONOMI DAERAH

¹Demmaraya, ² Abdul Latief, ³ Dermawan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, universitas Al Asyariah Mandar.

¹rayasambabo@gmail.com

²latief2002@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to describe the performance of the Village Consultative Body in Ulumambi village, Bambang Subdistrict in carrying out its duties and authority in the era of regional autonomy in the field of Exploring, Accommodating, Processing and Channeling Aspirations of Community Interests, Organizing Village Deliberations for Election of Village Heads, Determination of Village Regulations with Village Heads, And Supervision of Village Head Performance. Subjects in the study consisted of the village head, BPD chairman and 4 members of the Village Consultative Body and 6 community leaders as informants. The object of research is the performance of the Village Consultative Body in carrying out its duties and authority in the era of regional autonomy which is focused on the Work Program of the Village Consultative Body in Ulumambi Village, Bambang District Mamasa Regency. Data collection techniques used were interviews and documentation. Then the data analysis is done by interpreting the data that has been obtained into the form of sentences using the steps: (1) Presentation of data (2) Reduction of data (3) drawing conclusions. The findings of this study are that BPD has not been able to carry out its tasks to the maximum in accordance with the existing duties and functions.

Keywords: *Performance Evaluation, Village Consultative Body*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja Badan Permusyawaratan Desa di desa Ulumambi, Kecamatan Bambang dalam menjalankan Tugas dan wewenangnyanya di era otonomi daerah dibidang Menggali, Menampung, Mengolah dan Menyalurkan Aspirasi Kepentingan Masyarakat, Menyelenggarakan Musyawara Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa, Penetapan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Dan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Subjek dalam penelitian terdiri dari kepala desa, ketua BPD serta 4 anggota Badan Permusyawaratan Desa dan 6 tokoh masyarakat sebagai informan. Objek penelitian adalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya di era otonomi daerah yang di fokuskanpada Program Kerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan menginter pretasikan data-data yang telah diperoleh kedalam bentuk kalimat- kalimat dengan menggunakan langkah-langkah: (1) Penyajian data (2) Reduksi data (3) penarikan kesimpulan dari temuan penelitian ini adalah BPD belum dapat melaksanakan tugas dengan maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada.

Kata kunci: *Evaluasi Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1545>

Received : 05 September 2020 | Received in revised form : 15 September 2020 | Accepted : 01 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menggali, menampung mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Alam, 2019: 89).

Menurut Widjaja (2003: 3), desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Jadi, landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, gotong royong dan pemberdayaan masyarakat.

Secara etimologi, pemerintah berasal dari kata perintah menurut Poerwadarminta (2006 : 141) memberi pengertian sebagai berikut: Perintah, yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan sesuatu, Pemerintah, yaitu kekuasaan perintah suatu negara atau daerah, atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet yang merupakan suatu pemerintahan, Pemerintahan, yaitu manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang sederajat guna mencapai tujuan negara itu sendiri.

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dianggap sebagai parlemen desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan karena berkisar pada pemikiran pokok Soekanto (2004: 219).

Namun yang sering di temukan dan di rasakan masyarakat yaitu badan permusyawaratan desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dan banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan dan di anggap sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam menata dan melaksanakan pembangunan.

Badan permusyawaratan desa Ulumambi adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun dan di pilih langsung oleh masyarakat desa.

Melihat dari uraian di atas alasan penulis mengangkat judul "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya Di Era Otonomi Daerah" yaitu penulis mendengar masukan-masukan dari masyarakat bahwa badan permusyawaratan desa di Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa belum melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang di harapkan masyarakat. Dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian untuk masalah ini untuk mengetahui kebenaran yang terjadi dalam organisasi badan permusyawaratan desa, di Desa Ulumambi Kecamatan Bambang.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam buku Sukmadinata (2011: 73), menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami maupun yang di buat oleh manusia, yang lebih memperhatikan mengenai sifat, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan. Manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang di teliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang di berikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang di lakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Secara khusus penelitian ini di laksanakan di Badan Permusyawaratan Desa dengan alasan ingin mengetahui capaian program kerja yang telah disusun. Waktu penelitian ini di lakukan pada juli 2019 sampai Januari 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu yang kedudukannya sangat sentral karena hal tersebut bertujuan untuk memahami permasalahan yang akan di teliti lebih mendalam dan mendetail maka subjek penelitian ini di tentukan terlebih dahulu. Maelong (2010: 132) dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian. Berdasarkan pengertian itu yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, ketua BPD dan 4 anggota badan permusyawaratan desa serta 6 tokoh masyarakat.

Tabel 3.1 Subyek Penelitian

Subjek penelitian	Jumlah
Kepala desa	1 orang
Ketua BPD	1 orang
Anggota BPD	4 orang
Tokoh masyarakat	1 orang
Tokoh agama	1 orang
Tokoh adat	1 orang
Tokoh pendidikan	1 orang
Tokoh pemuda	1 orang
Kepala dusun	1 orang

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Fokus perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang di teliti atau di pecahkan permasalahannya. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah kinerja badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di erah otonomi daerah yang di fokuskan pada Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bersifat relatif seiring dengan perkembangan penelitian. Moleong (2017: 237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Penelitian ini, memfokuskan penelitian pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya di Era Otonomi daerah terfokus pada program kerja dibidang menggali, menampung, mengolah dan menyalurkan Aspirasi Kepentingan Masyarakat, Penyelenggaraan Musyawara Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa, Penetapan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Pengawasan Kinerja Kepala Desa dengan studi kasus pada Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang.

Adapun secara rinci disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Variabel	Indikator
Penelitian ini, memfokuskan penelitian pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya di Era Otonomi daerah	Untuk mengetahui capaian program BPD dibidang Menggali, Menampung, MengelolaMeyalurkan Aspirasi Kepentingan Masyarakat
	Untuk mengetahui capaian program BPD dibidang PenyelenggaraanMusyawara Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa
	Untuk mengetahui capaian Program BPD dibidang Penetapan Peraturan Desa Bersama Kepala
	Untuk mengetahui capaian program BPD dibidang Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Prosedur penelitian disusun agar pelaksanaan terarah dan sistematis menurut Moleong (2017: 127) ada tiga tahap dalam prosedur pelaksanaan penelitian yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan penjajakan lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan keberadaan BPD desa Ulumambi. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi melalui penelusuran data BPD yang ada di kantor desa ulumambi dan referensi pendukung lainnya.

Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang di gunakan dalam melakukan penelitian. Tahap pra lapangan di lakukan peneliti selama bulan juli 2019.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan selama bulan desember 2019.

3. Tahap analisis data

Peneliti dalam tahap ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai interpretasi data-data yang telah di peroleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempu proses triangulasi data yang di perbandingkan dengan teori ke pustakaan. Tahap analisis data di lakukan bulan desember 2019

F. Instrumen Penelitian

Dalam pengumpul data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Adapun instrumen lain dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka dengan menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu penambahan informasi dengan mengumpulkan data-data yang telah ada dan sumber dari data lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data di peroleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya kredibel. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk menemukan permasalahan yang ingin di teliti secara mendalam. Penelitian ini menggunakan semi struktur yaitu merupakan jenis wawancara yang termasuk in-depth interviw, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi struktur yaitu untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya, Sugiyono (2011: 320)

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan BPD dan Masyarakat. Isi dari wawancara sesuai dengan fokus masalah yaitu evaluasi kinerja badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di era otonomi daerah tentang menggali, menampung, mengolah Desa, Penyalur Aspirasi Kepentingan Masyarakat, Penyelenggaraan Musyawara Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa, Penetapan Peraturan Desa Bersama Kepala dan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa.

2. Dokumentasi

Sugiyono, (2011: 329) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya seperti gambar, patung dan film. Penelitian ini menggunakan dokumentasi foto dan administrasi. Dokumentasi administrasi yang di maksud berupa pengumpulan data administrasi yang berhubungan dengan BPD dan Desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan di lapangan di analisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data yang telah di peroleh kedalam bentuk kalimat dengan menggunakan langkah-langka seperti yang di uraikan Miles (2000: 19) data kualitatif analisisnya menggunakan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

1. Penyajian data adalah sebagai kegiatan menyusun suatu informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Dengan penarikan data akan dipahami apa saja yang terjadi, apa yang harus dilakukann dan menganalisa tindakan apa yang harus di lakukan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
2. Reduksi data diartikan kegiatan menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan memili bagian yang berkaitan dengan masalah penelitian
3. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang di lakukan setelah analisis data dan di nyatakan sebagai hasil akhir penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi penelitian

Desa Ulumambi adalah salah satu Desa dari 20 desa yang ada di kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa yang terletak di sebelah utara kota kecamatan Bambang dengan jarak dari ibu kota kecamatan ±10 Km dari pusat kota Kecamatan Bambang ke Desa Ulumambi cenderung sulit untuk diakses kendaraan karena keadaan jalan yang ekstrim

Selanjutnya untuk akses transportasi ke kecamatan tetangga yang terdekat (Kecamatan Mambi) saat musim hujan hanya dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 (motor) dengan biaya transportasi Rp.50,000/orang dengan jarak tempuh ±1 jam, barulah dari kecamatan Mambi dapat menggunakan kendaraan roda 4 (mobil) ke ibu kota kabupaten dengan biaya transportasi Rp.50,000-Rp.70,000 yang dapat ditempuh selama 4 jam perjalanan darat dengan menggunakan mobil atau sepeda motor.

Desa Ulumambi memiliki luas wilayah kurang lebih 100 km² dan terbagi atas 6 wilayah dusun dan tiap wilayah memiliki nama wilayah, berikut adalah pembagian wilayahnya: Dusun Tanete Kanan, Dusun Kanan, Dusun Tanete Ballo, Dusun Parantak, Dusun Parantak Timur, Dusun Sambabo

tabel 4.1 Secara geografis Desa Ulumambi berbatasan langsung dengan:

1	Sebelah Utara	Sebelah Utara
2.	Sebelah Barat	Desa Ulumambi Barat
3	Sebelah Selatan	Desa Salururu dan Desa Limba Debata
4	Sebelah Timur	Desa Sikamase dan Desa Balla Tumuka Kec. Balla

Sumber Data: Kantor Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang

Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Keadaan Agama

Menurut profil Desa Penduduk desa Ulumambi berasal dari suku toraja dengan bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi dalam masyarakat menggunakan bahasa daerah Bambang yang merupakan bahasa asli masyarakat Bambang. Bahasa ini mirip dengan bahasa Toraja dan Mamasa namun berbeda dialek. Penduduk Desa Ulumambi merupakan warga asli Bambang yang merupakan induk dari pemekaran Desa Sikamase dan Ulumambi Barat. Berdasarkan rekapitulasi jumlah penduduk Desa Ulumambi, jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 151 KK. Total jumlah Penduduk Desa Ulumambi sebanyak 686 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 322 jiwa dan jumlah Penduduk perempuan sebanyak 368 jiwa. Data lengkap untuk rekapitulasi jumlah penduduk desa Ulumambi

Tabel 4.2. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Ulumambi Tahun 2019

No	Dusun	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk
1	Dusun Parantak	29	188
2	Dusun Parantak timur	20	97
3	Dusun Tanete ballo	31	142
4	Dusun Tanete kanan	19	69
5	Dusun Kanan	26	94
6	Dusun Sambabo	26	96
Jumlah		151	686

Sumber Data: Kantor Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang 2019

Tabel 4.3 Klasifikasi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ulumambi adalah:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	141 orang
2	Tamat TK	29 orang
3	Tamat SD	303 orang
4	Tamat SMP	126 orang
5	Tamat SMA/ sederajat	66 orang
6	Sarjana	21 Orang
Jumlah		686

Sumber Data: Kantor Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang

Berdasarkan agama keadaan penduduk desa ulumambi sangat bervariasi. Berdasarkan data yang ada, penduduk desa ulumambi mayoritas penghayat kepercayaan mappurondo dengan jumlah 343 jiwa 50 %, kristen katolik 43 jiwa 6 % dan kristen protestan 300 atau 44 %, untuk lebih jelas maka di gambarkan tabel berikut:

Tabel 4.4: keadaan penduduk berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah jiwa	Presentase
1	Mappurondo	343	50 persen
2	Kristen protestan	300	44 persen
3	Kristen katolik	43	6 persen
Jumlah		686	100 persen

Sember Data: Kantor Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Organisasi Badan Permusyawaratan Ulumambi melalui Observasi dan dokumentasi pada tanggal 17 Desember 2019 di kantor desa Ulumambi maka diperoleh gambaran tentang Kedaan susunan organisasi, kedudukan atau jabatan BPD dan keadaan pendidikan BPD yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel 4.5 Susunan organisasi badan permusyawaratan desa Ulumambi periode 2016/2021:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Saltius	Laki laki	Ketua
2	Saripuddin	Laki laki	Wakil ketua
3	Obed	Laki laki	Sekretaris
4	Aristoni	Laki laki	Anggota
5	Sudirman	Laki laki	Anggota

Sember Data: Kantor Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang 2019

Untuk masing masing tugas akan sangat di tentukan oleh setiap orang yang bekerja/membidangi. Setiap anggota akan menjalankan tugas sesuai dengan yang di sepakati bersama dalam kubuh itu berdasarkan keterwakilan wilayah.

Tabel 4.6: keadaan Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi berdasarkan kedudukan/jabatan

No	Jabatan	Jumlah(orang)
1	Ketua	1
2	Wakil ketua	1
3	Skrtaris	1
4	Anggota	3
Jumlah		6

Sumber Data: Kantor Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang

Tabel 4.7: keadaan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah(orang)	Ket.
1	Sarjana	-	
2	SLTA/sederajat	4	Tamat
3	SLTP	1	Tamat
4	SD	1	Tamat
Jumlah		6	

Sumber Data: Kantor Desa Ulumambi, 2019

Bedasarkan kerangka pikir yang di sajikan dalam pembahasan ada tiga program utama Badan permusyawaratan Desa Ulumambi yang menjadi prioritas penelitian yaitu: menggali, menampung, mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat, merancang musyawara pemilihan kepala desa, menetapkan peraturan bersama kepala desa, serta melakukan Pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap responden maka diperoleh hasil wawancara mengenai program kerja BPD dimana semua responden sangat setuju, dan mengapresiasi serta mendukung program tersebut sebagaimana yang diaungkapkan oleh Sallik sebagai Bapak Kepala Desa Ulumambi pada saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 18 desember yaitu : “program kerja BPD dibidang penetapan peraturan desa, penyalur aspirasi kepentingan masyarakat dan pengawasan kinerja pemerintah desa itu sangat penting mengingat organisasi BPD Desa merupakan mitra pemerintahan desa, dan saya selaku kepala desa tentu sangat setuju dan mendukung”. Begitu pulah yang diungkapkan oleh bapak suardi selaku tokoh masyarakat yaitu: “kami sangat setuju dengan program yang ada namun kami sangat berharap supaya BPD desa Ulumambi berusaha dalam pelaksanaannya”. Saltius selaku Ketua BPD Mengatakan “dari ketiga Program yang kami buat, kami bersama dengan anggota BPD lainnya suda sangat setuju dan itu akan kami usahakan dalam pengimplemetasiannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disajikan pendapat masyarakat/informan terhadap program kerja yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa ulumambi periode 2016/2020 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8: pendapat masyarakat terhadap program kerja

Program kerja	Responden	Persentase
Setuju	12	100 persen
Tidak setuju	-	
Jumlah	12	100 persen

Gambaran tabel di atas tentang program kerja Badan permusyawaratan Desa Ulumambi ternyata dari 12 responden sebagai wakil dari masyarakat desa ulumambi mengatakan 100 persen setuju terhadap proja tersebut.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa program kerja yang di buat oleh badan permusyawaratan desa ulumambi mendapatkan respon positif oleh masyarakat dan pemerintah desa. Tentunya dengan harapan dalam pelaksanaannya mendapat loyalitas dari badan permusyawaratan desa sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Pendapat masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Kerja Badan permusyawaratan Desa Ulumambi

1. Program kerja dibidang menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi kepentingan masyarakat desa.

Hasil wawancara yang diperoleh dari respnden terkait program ini yaitu : ketua BPD dan anggota BPD setelah penulis melakukan wawancara terkalit pelaksanaan program kerjanya dibidang penyaluran aspirasi mereka menjawab dengan satu jawaban “kami di organisasi BPD merasa bahwa pelaksanaan program ini suda tercapai sesuai dengan harapan kami”, Namun yang di ungkapkan oleh Sallik selaku kepala desa yaitu : “kami selalu mendapat sorotan dari masyarakat terkait penyaluran aspirasi mereka yang katanya tidak dapat tersalurkan”, Sejalan yang dikatakan oleh tokoh-tokoh masyarakat bapak Aser “selaku tokoh masyarakat kami sangat mengharapkan BPD aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kami selalu menunggu BPD untuk menyalurkan aspirasi kami ke kepala desa”.

berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat meyajikan data dalam bentuk tabel sebagai hasil wawancara pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan program kerja PBD Ulumambi dibidang penyaluran aspirasi masyarakat desa, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10: Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan program kerja PBD Ulumambi di bidang penyaluran aspirasi masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Program kerja	Pelaksanaan	Responde n	Persentas e
Menggali, menampung , mengelolah dan penyaluran aspirasi masyarakat	Suda tercapai	6	50 persen
	Belum tercapai	6	50 persen
Jumlah		12	100 persen

Dari tabel di atas diketahui bahwa pendapat masyarakat (responden) terhadap pelaksanaan program kerja badan permusyawaratan desa di bidang penyaluran aspirasi masyarakat desa yaitu 50 persen responden mengatakan sudah tercapai dan 50 persen mengatakan belum tercapai.

Dari uraian tersebut dapat simpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang badan permusyawaratan desa ulumambi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum tercapai dengan maksimal di tandai dengan pendapat responden di atas. Dan sebagian besar responden sebagai wakil dari populasi penelitian mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa ulumambi tidak melaksanakan tugasnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat di tandai dengan kurangnya kunjungan kerja.

2. Program kerja dibidang penyelenggaraan musyawara desa untuk pemeliharaan kepala desa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan domentasi maka program badan permusyawaratan desa dibidang penyelenggaraan musyawara desa untuk pemeliharaan kepala desa belum terlaksana. Hasil wawancara dengan ketua BPD Saltius mengungkapkan “untuk masalah pemeliharaan kepala desa belum terlaksana sebab dalam masa periode kepala desa belum melaksanakan pemeliharaan kepala desa karena kami baru menjabat empat tahun sejak dipilih” hal yang serupa dikatan oleh anggota lainnya Aristono “untuk program ini belum dilaksanakan karena belum sampai waktunya” dan begitu juga yang disampaikan oleh responden yang lainnya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan maka untuk program ini belum terlaksana karena belum sampai waktunya.

3. Program kerja dibidang penetapan peraturan desa bersama kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis maka diperoleh jawaban responden sebagai berikut : Sallik (kepala desa Ulumambi) “kami selaku pemerintah desa merasa bahwa BPD suda ikut dalam menyepakati peraturan desa, sebab pada saat musrembang mereka hadir”, begitupun juga yang diungkapkan enam tokoh masyarakat seperti Usmanto yang spontan menjawab “saya merasakan keikut sertaan BPD pada setiap musayawara terkait penetapan peraturan desa sebab mereka selalu ada pada setiap mudes” begitu juga yang dikatan oleh ketua BPD Saltius dan satu anggotanya yaitu Obet yang sama sama mengatatakan “kami selalu

hadir pada setiap penetapan peraturan desa bersama kepala desa dan memasukkan sumbang saran yang kami ketahui”, namun dua anggota BPD desa Ulumambi yaitu sudirman dan saripuddin mengatakan “pada saat penetapan peraturan desa memang kami selalu hadir tapi tidak dapat memberi saran kami hanya diam saja, kami tidak mengerti soal peraturan”, Aristni sebagai sala satu anggota BPD mengatakan “kehadiran kami selaku BPD pada saat penetapan hanya sebagai saksi saja karena sebagian dari kami tidak mengerti soal undang-undang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat meyajikan data dalam bentuk tabel sebagai hasil wawancara Pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan program kerja BPD Ulumambi di bidang Penetapan Peraturan Desa Bersama kepala desa, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9: pendapat masyarakat terhadap program kerja bidang Penetapan Peraturan Desa Bersama kepala desa

Program kerja	Pelaksanaan	Responden	Persentase
Penetapan Peraturan desa bersama kepala desa	Suda tercapai	9	75 persen
	Belum tercapai	3	25 persen
Jumlah		12	100 persen

Dari tabel di atas di ketahui bahwa pendapat masyarakat (responden) terhadap pelaksanaan program kerja badan permusyawaratan desa dibidang penetapan peraturan desa ulumambi bersama kepala desa yaitu 75 persen responden mengatakan sudah tercapai dan 25 persen mengatakan belum tercapai.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang badan permusyawaratan desa ulumambi dalam keikutsertaan terhadap penetapan peraturan desa belum tercapai dengan maksimal.

4. Program kerja dibidang pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat didusun tanete kanan bapak Yusak, beliau mengatakan “program kerja BPD dibidang pengawasan belum tercapai sabab mereka biasa diam saja ketika ada kegiatan di desa yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya”, begitu juga yang di katakan oleh Suardi dan Aser. Dan juga jawaban yang diperolrh penulis dari Tokoh Masyarakat dari Dusun tanete ballo, Parantak dan Kanan dengan satu jawaban “pogram BPD ini belum terlaksana”, kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak Obet selaku anggota BPD beliau mengatakan “program ini belum terlaksana karena kami kurang aktif melakukan monitoring pada setiap kegiatan berjalan di desa”, begitu juga yang dikatakan oleh Sudirman dan aristoni. Namun hasil wawancara penulis dengan ketua BPD Saltius dan satu anggota BPD yaitu Bapak Saripuddin mengatakan “program ini suda terlaksana”, Bapak Kepala desa yaitu Sallik pun mengatakan demikian.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat meyajikan data dalam bentuk tabel sebagai hasil wawancara pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan program kerja PBD Ulumambi di bidang Pengawasan kinerja pemerintah desa, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11: berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan program kerja PBD Ulumambi di bidang Pengawasan kinerja pemerintah desa yaitu:

Program kerja	Pelaksanaan	Responden	Persentase
Pengawasan kinerja pemerintah desa	Suda tercapai	3	25 persen
	Belum tercapai	9	75 persen
Jumlah		12	100 persen

Dari tabel di atas di ketahui bahwa pendapat masyarakat (responden) terhadap pelaksanaan program kerja badan permusyawaratan desa dibidang pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yaitu 25 persen responden mengatakan sudah tercapai dan 75 persen mengatakan belum tercapai.

Dari uraian tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan program kerja badan permusyawaratan desa ulumambi di bidang pengawasan kinerja kepala desa suda berjalan 50 persen, namun belum mecapai target yang sebenarnya.

C. Pembahasan

Deskripsi Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya di Era Otonomi Daerah

1. Deskripsi kinerja badan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi dalam Menjalankan Tugas dan wewenangnya di era Otonomi daerah di bidang: menggali, menampung, mengolah dan menyalurkan aspirasi kepentingan masyarakat desa

Melihat dari hasil penelitian yang di paparkan pada hasil penelitian maka badan permusyawaratan desa ulumambi belum dapat melaksanakan Tugas sesuai dengan tupoksinya secara maksimal dilihat dari pendapat responden yang ada dan kinerjanya hanya tercapai 50 persen dan belum tercapai 50 persen

2. Deskripsi kinerja badan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi dalam Menjalankan Tugas dan wewenangnya di era Otonomi daerah dibidang Program kerja dibidang penyelenggaraan musyawara desa untuk pemeliharaan kepala desa.

Dari hasil penelitian yang di sampaikan sebelumnya melalui wawancara dan observasi maka untuk program ini belum terlaksana karena belum sampai waktunya dan nanti akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

3. Deskripsi kinerja badan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi dalam Menjalankan Tugas dan wewenangnya di era Otonomi daerah di bidang penetapan peraturan desa bersama kepala desa

Dari uraian yang ada pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang badan permusyawaratan desa ulumambi dalam keikutsertaan terhadap penetapan peraturan desa suda mulai berbena namun belum maksimal. Dengan melihat tanggapan dari responden yang ada yaitu 75 persen suda tercapai dan 25 persen belum tercapai.

4. Deskripsi kinerja badan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi dalam Menjalankan Tugas dan wewenangnya di era Otonomi daerah di bidang pengawasan pemerintahaa desa

Dengan melihat hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka kinerja atau pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang badan permusyawaratan desa ulumambi dalam keikutsertaan terhadap bidang pengawasan pemerintahan desa berdasarkan tanggapan responden hanya tercapai 25 persen dan masi belum tercapai 75 persen.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan desa ulumambi yang disosialisasikan kepada masyarakat pada awal periode pemerintah desa dan BPD maka yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12: Prioritas Pembangunan Desa Ulumambi

Prioritas Pembangunan	Keberhasilan	
	Dicapai	Belum dicapai
Sarana pendidikan	70 persen	30 persen
Sarana transportasi	40 persen	60 persen
Sarana kesehatan	30 persen	70 persen
Pemukiman	45 persen	55 persen

Sumber data: Kantor Desa Ulumambi 2019

Dari tabel di atas di ketahui bahwa prioritas pembangunan desa ulumambi untuk bidang sarana pendidikan sebanyak 70 persen dan belum tercapai 30 persen, bidang sarana Transportasi sudha tercapai 40 persen belum tercapai 60 persen, bidang sarana kesehatan suda terpai 30 persen belum Tercapai 70 persen dan sarana pemukiman suda tercapai 45 persen belum tercapai 55 persen.

Melihat uraian di atas dapat di nyatakan bahwa pembangunan sarana prasarana belum mencapai target, namun suda mulai berbena ke yang lebih baik. Dengan hal tersebut kerja sama anantara pemerintah dan masyarakat desa dalam hal pembangunan desa sangat berpengaruh, sehingga di butuhkan kerja sama anta masyakat dengan pemerintah desa melalui sumbangsi pendapat dan pemikiran.

Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi adalah wakil dari Penduduk Desa ulumambi berdasarkan keterwakilan wilayah dusun diharapkan bisa berperan aktif dan loyal dalam menjalankan tugas dan peranannya sebagai legislasi desa ulumambi dan penyambung lida masyarakat sehingga tercipta kerja

sama yang baik namun keterangan yang diperoleh dari responden Kinerja BPD desa ulumambi belum dapat berjalan maksimal, sesuai dengan dengan ketengan yaitu program BPD dibidang Penetapan peraturan bersama kepala desa hanya tercapai 75 persen dan pada bidang penyaluran aspirasi kepentingan masyarakat hanya tercapai 50 persen serta pada pogram bidang pengawasan kinerja kepala desa hanya tercapai 25 persen.

4. SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya di era Otonomi daerah maka dapat di tarik kesimpulan bahwa sesuai dengan programn yang ada yaitu: Penetapan peraturan desa bersama kepala desa, Penyaluran asprasi masyarakat desa, dan Pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Adapun Faktor penghambat kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi yaitu Pendidikan anggota BPD rata-rata rendah, Wawasan anggota BPD belum Memadai, Kerja sama anggota BPD dengan pemerintah dan masyarakat kurang, serta Loyalitas anggota BPD masi sangat kurang.

B. Saran-saran.

Sesuai dengan judul yang di angkat maka sumbang saran yang di berikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa, kiranya dapat memebrikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja desa atau agenda yang akan di laksanakan setiap tahunnya sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa dan pemerintah desa terus memperbaiki polah pemerintahan yang ada sehingga visi dan misi desa dapat tercapai.
2. Kepada badan permusyawaratan desa sebagai mitra kerja kepala desa dan legislasi dese juga merupakan wakil dari penduduk desa, kira dapat menjalankan tugas sebagaimana yang di berikan oleh pemerintah dan masyarakat desa sehingga terjadi kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
3. Kepada seluruh lapisan masyakata desa, supaya tetap mendukung pemerintah desa dalam membangun desa, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di desa.
4. Kepada peneliti selanjutnya, kiranya hasil penelitian ini dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kemahasiswaan dan juga memebrikan pembelajaran dan pengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Mamasa. *Pepatudzu*, 15(1), 88-108.

DSSAT v3. In *Understanding options for agricultural production* (pp. 157-177). Springer, Dordrecht.

Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2012). *Practical meta-analysis*. SAGE publications, Inc.

MARolA, K. V., KBNT, J., & Bibly, J. M. (1979). *Multivariate analysis*. AcadeInic Press, Londres.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.

Mishan, E. J., & Euston. Quah. (2019). *Cost-benefit analysis* (Vol. 454). New York: Praeger.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (XXVII)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2006

Rolos, j. C., sambiran, s., & singkoh, f. (2018). *Peranan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur didesa winebetan kecamatan langowan selatan kabupaten minahasa*. Jurnal eksekutif, 1(1).

Sugiyono S P. D. (2011). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfa Beta.

Sugiyono, Soekanto. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

Latief, A., Dermawan, D., & Rahayu, N. (2019, November). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Word Square terhadap Hasil Belajar PPKn. In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 1, No. 2, pp. 72-77).

Juramlah, J., Tamin, R., & Khairat, U. L. (2021, June). sistem informasi transaksi tabungan siswa berbasis android. In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 2, No. 1).